



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor SOP	000.8.3.3/01/BPBD/2023
Tanggal Pembuatan	09 JANUARI 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 JANUARI 2023
Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU 

Nama SOP Analisis Hasil Pengamatan Gejala Bencana

Dasar Hukum

1. Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kompetensi Bidang Kebencanaan, khususnya di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Bekerja secara Profesional

Keterkaitan

1. SOP Pengamatan Gejala Bencana

Peralatan / Perlengkapan

1. Data dan Informasi dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon
2. Buletin Klimatologi BMKG
3. Daftar Kontak BPBD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Maluku

Peringatan

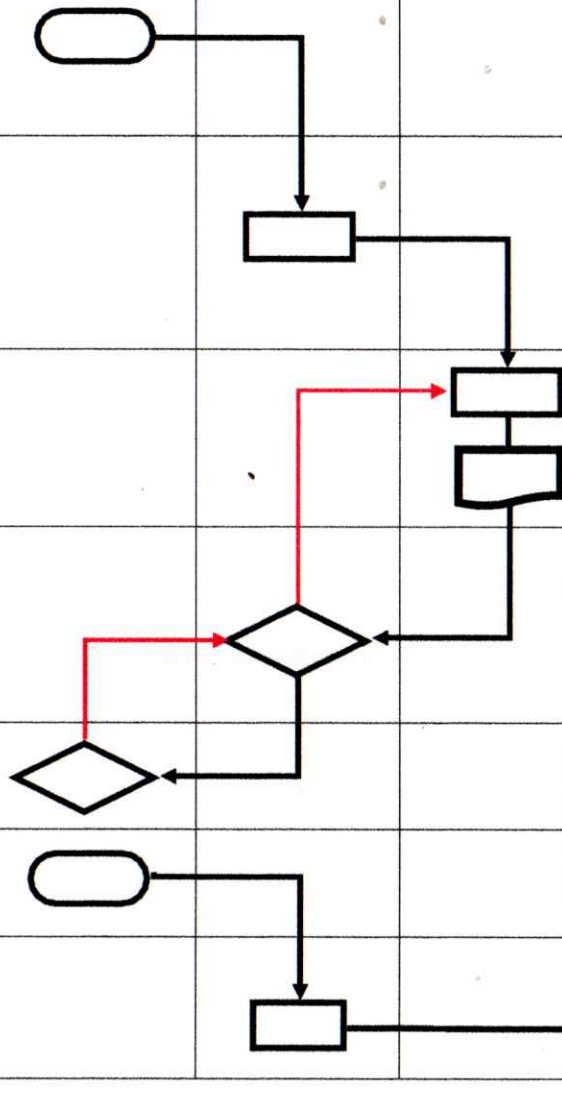
1. SOP Analisis Pengamatan Gejala Bencana ini dilaksanakan untuk mempercepat proses diseminasi informasi peringatan dini yang bertujuan untuk melindungi Masyarakat dari ancaman bencana.

Pencatatan dan Pendataan

1. Analisis Pengamatan Gejala Bencana harus ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Himbauan atau Infografis untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ANALISIS HASIL PENGAMATAN GEJALA BENCANA HIDROMETEOROLOGI
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD PROVINSI MALUKU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA BIDANG PK	JFT	STAF	KEPALA PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Kabid memberikan perintah kepada JFT untuk mempelajari informasi peringatan dini maupun informasi pendukung lainnya yang bersumber dari Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon dan Stasiun Klimatologi SBB				1	Lembar Disposisi	5 Menit	Surat Perintah	
2	JFT mempelajari data yang diterima dan memberikan petunjuk kepada Staf untuk membuat surat himbauan kepada BPBD Kabupaten/Kota tentang informasi peringatan dini maupun informasi pendukung lainnya.					Surat Perintah Lembar Disposisi	5 menit	Paraf Disposisi	
3	Staf menyusun draft Surat Himbauan kepada BPBD Kabupaten/Kota dan menyerahkan hasilnya kepada JFT					Surat Perintah Lembar Disposisi	30 menit	Draft Surat Himbauan	
4	JFT menelaah Draft Surat Himbauan yang diterima dan menyerahkannya kepada Kabid jika sudah tidak koreksi atas draft Surat Himbauan yang telah tersusun					Draft Surat Himbauan	5 menit	Paraf Dokumen Draft Surat Himbauan	
5	Kabid menelaah Draft Surat Himbauan yang telah tersusun					Draft Surat Himbauan	5 menit	Paraf Dokumen Draft Surat Himbauan	
6	Kabid memberikan perintah kepada JFT untuk pengajuan tanda tangan Kepala Pelaksana BPBD					Draft Surat Himbauan	5 menit	Nota Dinas Pengajuan Draft Surat Himbauan	
7	JFT menugaskan bawahan untuk mengajukan Draft Surat Himbauan kepada Kepala Pelaksana BPBD					Nota Dinas Pengajuan Draft Surat Himbauan	5 menit	Nota Dinas Pengajuan dan Draft Surat Himbauan yang	



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA BIDANG PK	JFT	STAF	KEPALA PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
					↓			telah diparaf koordinasi	
8	Surat Himbauan ditandatangani oleh Kepala Pelaksana				↓ □	Nota Dinas Pengajuan Draft Surat Himbauan	5 menit	Surat Himbauan	
9	Pengambilan nomor surat di bagian sekretariat oleh Staf dan dilakukan scan dokumen surat. Staf melaporkan surat telah ditandatangani kepada JFT			↓ □	←	Surat Himbauan yang telah ditandatangani Kepala Pelaksana	5 menit	Surat Himbauan	
10	JFT melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Bidang PK		↓ □	←		Surat Himbauan yang telah ditandatangani Kepala Pelaksana	5 menit	Surat Himbauan	
11	Surat Himbauan yang telah ditandatangani segera disebarluaskan melalui e-mail dan group Whatsaap BPBD se-Maluku. Surat Himbauan diarsipkan di Bagian Sekretariat	□ □	↓ □	←	□ □	Surat Himbauan yang telah ditandatangani Kepala Pelaksana	5 menit	Arsip Surat Himbauan	